

KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG BLEKOK DI KABUPATEN SITUBONDO

Desi Anjarwati¹⁾, Vita Novianti²⁾, Dini Noor Aini³⁾

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email desianjar725@gmail.com

Abstrak

Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo merupakan destinasi wisata berbasis konservasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan ekosistem mangrove. Namun, pengembangan wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan jumlah kunjungan wisata, minimnya koordinasi antar *stakeholder*, belum optimalnya kelembagaan pengelola, dan kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *stakeholder* melibatkan lima unsur dalam model *pentahelix*, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang diwujudkan melalui kegiatan konservasi lingkungan, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta forum diskusi antar *stakeholder*. Faktor pendukung kolaborasi meliputi kesadaran bersama terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, dukungan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Namun, kolaborasi belum berjalan optimal karena belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang resmi, lemahnya koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder*, serta ketidakjelasan pembagian peran. Dengan demikian, kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok berada pada tahap berkembang (*evolving*), sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Kata kunci : Kolaborasi *Stakeholder*, *Pentahelix*, Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Abstract

Kampung Blekok Tourism in Situbondo Regency is a conservation-based tourist destination that holds great potential for development, focusing on environmental preservation and the mangrove ecosystem. However, the development of the area faces various challenges, such as a decline in tourist visits, a lack of coordination among stakeholders, an unoptimized management institutional framework, and a lack of active participation from various parties. This study aims to analyze the stakeholder collaboration process in the development of Kampung Blekok Tourism in Situbondo Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique, encompassing elements of government, the private sector, academics, the community, and the media. Data analysis used an

interactive model including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that stakeholder collaboration involves five elements within the pentahelix model, namely government, private sector, academics, community, and media, which is manifested through environmental conservation activities, tourism promotion, community empowerment, Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and stakeholder discussion forums. Supporting factors for collaboration include a shared awareness of the importance of environmental preservation, local government support, community involvement, and economic benefits felt by the local community. However, the collaboration has not run optimally due to the absence of a formal management institution, weak coordination and communication among stakeholders, and unclear division of roles. Consequently, stakeholder collaboration in the development of Kampung Blekok Tourism is at an evolving stage, necessitating institutional strengthening, enhanced coordination, and shared commitment to realize sustainable tourism development.

Key Words: *Stakeholder Collaboration, Pentahelix, Development of Kampung Blekok Tourism.*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. UNWTO (2019) menegaskan bahwa pariwisata berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Schubert et al. (2011) menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan karena dapat mempromosikan daerah yang kurang berkembang (Dahribal Ashar, 2024). Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya yang ada, melainkan juga pada sistem tata kelola dan pendekatan strategis yang diterapkan. Tanpa rencana dan pengelolaan yang memadai, industri pariwisata berisiko menciptakan kesenjangan sosial serta kerusakan lingkungan di destinasi wisata.

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang semakin relevan dalam pengembangan industri pariwisata di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan menjadi strategi penting untuk memastikan manfaat jangka panjang (Novi Irawati, Hendi Prasetyo 2025). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan penguatan sosial budaya lokal (Dodds & Butler, 2019; Irawati & Prasetyo, 2025). Oleh karena itu, tata kelola pariwisata menurut kolaborasi lintas aktor melalui pendekatan *governance* kolaboratif.

Pariwisata merupakan sektor yang lingkupnya sangat luas karena meliputi berbagai aktivitas seperti perjalanan, rekreasi, pembelajaran, kebudayaan, serta wisata yang berbasis pada alam. Saat ini, salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang semakin dikembangkan adalah ekowisata. Ekowisata tidak berfokus hanya pada upaya menarik kunjungan wisatawan, melainkan juga mengutamakan pelestarian lingkungan, memberikan edukasi, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Ekowisata dipandang sebagai salah satu bagian dari pariwisata yang memanfaatkan potensi alam secara optimal tanpa mengabaikan upaya menjaga kelestarian ekosistem yang ada.

Salah satu destinasi wisata yang memiliki karakteristik adalah Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan ini didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang konservasi keanekaragaman hayati menempatkan kawasan Kampung Blekok sebagai wilayah yang memiliki fungsi pelestarian lingkungan, perlindungan habitat burung blekok, serta ekosistem mangrove. penelitian ini merujuk pada status kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang secara formal diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 dan SK POKDARWIS Nomor 188/35/431.510.9.4/2017 sebagai destinasi wisata. Pengelolaan Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Lingkungan (DLH), Pemerintah Desa Klatakan, Pemerintah Kecamatan Kendit, serta masyarakat sekitar kawasan pesisir.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan Wisata Kampung Blekok masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian ini, Kampung Blekok mengalami penurunan aktivitas wisata pasca-pandemi. Kedatangan pengunjung tergantung dengan situasi dan kondisi di Kampung Blekok. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung Desa Wisata Kampung Blekok sekitar 63.602 pengunjung, namun pada 2020 lantaran jumlah pengunjung menurun drastis, yakni berjumlah 23.409 orang. Pada tahun 2021 saat covid masih parah, pengunjung kembali turun menjadi 11.571 orang. Tapi pada tahun 2022 jumlah pengunjung naik menjadi 14.520 orang. (<https://kolomdesa.com/kampung-blekok-habitat-burung-endemik-langka-9287/>).

Pengembangan pariwisata yang berfokus pada konservasi membutuhkan kerjasama yang efisien antar para pemangku kepentingan agar pengelolaan lokasi wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan. Namun, adanya kerjasama yang kurang kuat, pembagian tanggung jawab yang belum ideal, dan rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan masih menjadi masalah dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ramadhan dan rekan-rekan (2022), mengungkapkan bahwa ego sektoral dan lemahnya koordinasi menjadi penghalang utama dalam pengembangan desa wisata, tetapi belum membahas mengenai proses kerjasama di destinasi yang mengalami stagnasi setelah pandemi. Oleh karena itu, studi ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis proses kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui *Collaborative Team Process* dalam model *Pentahelix*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kolaborasi *stakeholder* serta model *pentahelix* dalam pembangunan destinasi wisata berbasis komunitas, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* dalam memperkuat sinergi, revitalisasi pengelolaan, serta mewujudkan pengembangan Wisata Kampung Blekok yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi realitas nyata yang berkaitan dengan interaksi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam proses pengembangan pariwisata di Kampung Blekok. Lokasi penelitian adalah area Wisata kampung Blekok yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan selama dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026.

Teknik pemilihan informan dilaksanakan secara *purposive sampling*, dimana informan ditentukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Penulis akan mewawancarai informan utama dari pihak pemerintah yang meliputi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Camat Kendit, Kepala Desa Klatakan serta POMI. Sebagai informan tambahan dan pendukung, penulis juga mewawancarai POKDARWIS, BUMDes, Akademisi, Media serta Masyarakat di sekitar Wisata Kampung Blekok. Data Sekunder diperoleh dari dokumen, catatan. Laporan, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data pada penelitian ini berpedoman pada analisis data kualitatif yang dilaksanakan Miles Huberman dan Saldanan (2014:14) yang dikutip oleh Sugiono (2019:322) yaitu *Data Collection* atau pengumpulan data, *Data Condensation* atau pengabungan data, *Data Display* atau penyajian data dan *Conclusing Drawing/Verifcation* atau kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wisata Kampung Blekok

Kampung Blekok merupakan kawasan konservasi mangrove dan burung air di Kabupaten Situbondo. Kawasan ini merupakan kawasan unik yang dihuni oleh ribuan burung air berkoloni di area mangrove Kampung Blekok. Kawasan Wisata Kampung Blekok berada di Dusun Pesisir Timur yang merupakan salah satu wilayah administrative yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Wisata Kampung Blekok dikembangkan melalui konsep ekowisata berbasis *community-based tourism* dikarenakan area konservasi mangrove seluas kurang lebih enam hektare ini merupakan tempat hidup dari burung blekok dengan beragam spesies. Desa tempat wisata ini juga merupakan sentra kerajinan tangan berbahan dasar kayu, Melihat potensi wisata ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan wisata ini dinaungi oleh kelompok sadar wisata (POKDARWIS).

Identifikasi dan Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Wisata Kampung Blekok menunjukkan keterlibatan multi-*stakeholder* yang mencerminkan pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta media. Keberagaman aktor ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan bersifat kolaborasi dan lintas sektor. Dinas Lingkungan hidup (DLH) merupakan *stakeholder* utama yang memiliki kewenangan atas kawasan, baik dari segi administratif maupun pengelolaan aset kolaborasi ini telah berlangsung dan menampakkan sinergi antarpihak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Tabel 4.1 Identifikasi dan Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Nama <i>Stakeholder</i>	Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
1	Ranti Seta Ayu Pratiwi, S.T. Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)	Pendampingan proses perencanaan hingga pembangunan fisik kawasan. Dan juga pembinaan terhadap pelaku usaha dan komunitas yang beroperasi dikawasan.
2	Zukarnain Amrullah, S.P	Sebagai pendorong dan Pembina inovasi,

No	Nama Stakeholder	Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
	(Camat Kendit)	koordinator kolaborasi, namun innovator utama tetap ditingkat desa, kecamatan berfungsi sebagai Pembina dan fasilitator.
3	Narwiyoto, S.H (Kepala Desa Klatakan)	Penyusunan kebijakan dan regulasi desa wisata sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
4	Andri Wibisono, S.H., M.Si (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)	Sebagai membina pariwisata dalam bidang usaha yang meliputi daya tarik wisata, kasa transportasi, jasa makanan minuman, akomodasi, hotel restoran, kolam renang, mice yang meliputi rapat, event, budaya dan jasa konsultasi wisata.
5	Muhammad Lubad (POMI)	Fasilitator dan pendampingan dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta infrastruktur pendukung wisata dan sebagai aspek promosi seperti branding, publikasi, media, jejaring kemitraan, serta dukungan event untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisata.
6	Ali Murtadha (POKDARWIS)	Membangun komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan wisata. diantaranya dalam aspek pengelolaan teknis dan juga dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
7	Adi Muhtar, S.Pd, Gr (BUMDes)	Mendukung dan memfokuskan pada penguatan potensi ekonomi turunan dari pariwisata, seperti pengembangan UMKM, penyediaan produk lokal dan unit usaha desa. Sebab BUMDes tidak terlibat langsung karena sudah jadi kewenangan POKDARWIS.
8	Dr. Yuni Kartika Dewi, S.Pd., M.Si (Akademisi)	Mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi solusi berbasis ilmiah.
9	Setiawan Pangestu (Media Ark Of Mangrove)	Memanfaatkan peluang untuk menjangkau audiens seluas mungkin serta menjadi wadah dalam menyampaikan berbagai kampanye.
10	Totok (Masyarakat)	Inisiatif ekonomi seperti pendirian usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Kolaborasi *stakeholder* di Wisata Kampung Blekok telah terwujud, tetapi masih terkendala oleh ketidakseimbangan peran, koordinasi lemah, dan partisipasi yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sinergi, kejelasan tugas, serta komunikasi yang lebih baik antarpihak untuk menjadikan pengembangan wisata lebih efektif dan berkelanjutan.

Bentuk Kolaborasi antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan sektor swasta, yang masing-masing berkontribusi sesuai kemampuan dan wewenangnya. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama, termasuk penyusunan program, pengelolaan harian, penyediaan infrastruktur, serta promosi destinasi. Melalui kolaborasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, pengembangan Wisata Kampung Blekok diharapkan berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi komunitas setempat.

Tabel 4.2 Bentuk Kolaborasi antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Nama <i>Stakeholder</i>	Bentuk Kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
1	Ranti Seta Ayu Pratiwi, S.T Kepala Bidang Pengedalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)	Koordinasi pembentukan lembaga pengelola baru, penyusunan konsep wisata edukasi dan pengaturan pengelolaan kawasan
2	Zukarnain Amrullah, S.P (Camat Kendit)	Kerja sama antar pemerintah masih belum berjalan secara maksimal akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama yang terstruktur.
3	Narwiyoto, S.H (Kepala Desa Klatakan)	Koordinasi pengelolaan pariwisata, pemberdayaan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
4	Andri Wibisono, S.H., M.Si (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)	Dukungan untuk tempat pengembangan tempat wisata, penguatan kampanye promosi sektor pariwisata, dan pengoptimalan kerja sama <i>stakeholder</i> .
5	Muhammad Lubad (POMI)	Sinergi dalam koordinasi dan perencanaan program secara kolektif antar pemangku kepentingan.
6	Ali Murtadha (POKDARWIS)	Pengelolaan kegiatan operasional sektor pariwisata, menjalin koordinasi dengan DLH dan pemerintah desa, serta menjalankan program-program pariwisata.
7	Adi Muhtar, S.Pd, Gr (BUMDes)	Penataan dan pengembangan unit usaha pariwisata dengan koordinasi perencanaan ditingkat desa
8	Dr. Yuni Kartika Dewi,	Keterlibatan instansi pemerintah mulai dari

No	Nama Stakeholder	Bentuk Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
	S.Pd., M.Si (Akademisi)	desa, kecamatan, hingga DISPAR kemudian meluas ke media dan akademisi, namun terkendala oleh minimnya koordinasi dan komunikasi.
9	Setiawan Pangestu (Media Ark Of Mangrove)	Sinergi promosi dan publikasi destinasi wisata melalui platform digital bersama stakeholder terkait.
10	Totok (Masyarakat)	Kolaborasi antara POKDARWIS dan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata belum didukung partisipasi masyarakat yang optimal.

Hasil penelitian dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, POKDARWIS, BUMDes, sektor swasta, media, akademisi, dan masyarakat. Bentuk kerjasama ke depan, penguatan kolaborasi ini ditunjukkan melalui pembentukan lembaga pengelola baru dan konsep wisata minat khusus yang terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Permasalahan dan Dampak Kolaborasi terhadap Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Dalam aspek pengelolaan kegiatan wisata, terdapat pola kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa Klatakan, dan POKDARWIS Kampung Blekok yang berlangsung selama periode 2017 hingga 2022. Kontribusi aktif pemerintah desa baru dimulai sejak pembukaan wisata pada tahun 2019. Proses pengembangan Wisata Kampung Blekok, para pemangku kepentingan masih dihadapkan pada berbagai masalah. Situasi tersebut tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki. Kolaborasi antar stakeholder menjadi faktor yang amat krusial, sebab tidak hanya membantu mengatasi berbagai kendala tersebut, tetapi juga menghasilkan dampak terhadap peningkatan keberlanjutan pengembangan Wisata Kampung Blekok. Pengembangan Wisata Kampung Blekok belum optimal karena sejumlah kendala, seperti pemindahan anggaran akibat pandemi, koordinasi antarpihak yang lemah, serta ketiadaan revitalisasi kawasan secara komprehensif. Tambahan lagi, masalah teknis seperti aksesibilitas buruk dan pengelolaan yang tidak efektif menyebabkan penurunan pengunjung. Pandemi COVID-19 menghentikan perpanjangan kerjasama formal sejak Februari 2022 dan mencegah pembentukan lembaga pengelola resmi, sehingga pengelolaan kurang terstruktur, memicu penurunan wisatawan, pendapatan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur pasca-banjir yang merusak akses dan kenyamanan pengunjung. Kolaborasi antar pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan BUMDes pun belum optimal karena absennya strategi pengelolaan kolektif. Namun, dampak positif muncul dari peran media yang sukses mempromosikan wisata minat khusus, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan usaha lokal dan kebanggaan atas status destinasi wisata, meski tidak merata di kalangan warga.

Tabel 4.3 Permasalahan dan Dampak Kolaborasi Terhadap Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Permasalahan	Dampak
1	<i>Refocusing</i> anggaran akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan program pengembangan wisata tidak berjalan.	Akibat pandemi covid-19, perjanjian kerja sama antar pemangku kepentingan tidak diperpanjang sejak Februari 2022, serta lembaga pengelola wisata resmi belum terbentuk.
2	Infrastruktur yang mengalami kerusakan seiring dengan kurangnya koordinasi antar <i>stakeholder</i> terkait.	Pademi covid-19 mengakibatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah wisatawan yang datang.
3	Pengelolaan wisata dan aksesibilitas kawasan masih belum optimal, dengan jalur yang cenderung memanjang dan tidak membentuk sirkulasi.	Jembatan kayu utama Kampung Blekok rusak akibat banjir February 2025, belum diperbaiki hingga kini, berisiko menghambat aksesibilitas dan pengembangan wisata berkelanjutan.
4	Perbedaan persepsi sosial dan konflik dalam masyarakat terkait pengembangan sektor pariwisata.	Kolaborasi <i>stakeholder</i> di Kampung Blekok berdampak positif pada lingkungan dan ekonomi masyarakat, namun belum optimal karena belum ada strategi kolektif antara DLH, Pemerintah desa, kecamatan, dan BUMDes. Akibatnya, pengembangan wisata belum terintegrasi.
5	BUMDes mengalami keterbatasan dalam beroperasi di sektor wisata karena tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan, serta terdapat regulasi yang membatasi pengembangan usaha guna menghindari tumpang tindih dengan pengelola lainnya.	Media yang berfungsi sebagai penghubung informasi antara penyedia jasa dan wisatawan, berdampak positif dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap Kampung Blekok.
6	Kapasitas SDM, alokasi peran masyarakat, serta pemeliharaan fasilitas wisata masih belum berjalan dengan optimal.	Kampung Blekok berdampak positif secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pendapatan pelaku usaha lokal meningkat. Secara sosial, masyarakat bangga dengan daerahnya sebagai destinasi wisata di Kabupaten Situbondo.
7	Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan setelah pandemi hingga awal tahun 2024, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas sektor wisata.	

Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Faktor pendukung merupakan faktor yang dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap proses suatu program. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam memperkuat hubungan dan koordinasi antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya sehingga kegiatan pengembangan wisata dapat berjalan lebih efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menjadi kendala setiap kegiatan dan bisa berdampak negatif.

Kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Blekok didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi wisata. Seluruh pihak memahami bahwa hutan mangrove dan burung blekok merupakan daya tarik utama yang harus dijaga bersama. Kesadaran ini mendorong pemerintah, masyarakat, POKDARWIS, dan pelaku UMKM untuk berkolaborasi dalam upaya konservasi. Kedua, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi sarana penting dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*. Ketiga, dukungan pemerintah daerah melalui RPJMD, CSR, komunitas penggiat wisata, dan partisipasi masyarakat. Keempat, kehadiran Wisata Kampung Blekok memberikan dampak ekonomi positif berupa terbukanya peluang usaha dan perkembangan sektor UMKM seperti kerajinan kerang dan kayu.

Masalah utama dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok adalah ketiadaan lembaga pengelolaan resmi yang menyebabkan pengelolaan berada dalam kondisi vakum dan koordinasi antar *stakeholder* menjadi lemah. Belum adanya revitalisasi kawasan juga membuat pengembangan wisata mengalami stagnasi. Selain itu, masih adanya pola pikir parsial di kalangan masyarakat yang cenderung mengelola secara mandiri tanpa kelembagaan formal. Perbedaan pandangan terkait aksesibilitas wisata dan belum jelas pembagian peran antara BUMDes dan POKDARWIS juga menjadi penghambat.

Tabel 4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	<i>Stakeholder</i> menyadari keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi sektor pariwisata.	Belum terbentuknya lembaga pengelola wisata yang resmi menjadikan operasional pengelolaan Wisata Kampung Blekok belum terstruktur dan berjalan dengan baik.
2	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) diselenggarakan sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan pemecahan masalah bersama antar <i>stakeholder</i> .	Tidak ada aktivitas pariwisata yang berjalan di Kampung Blekok, belum adanya pembaruan atau revitalisasi kawasan wisata, dan minimnya kegiatan yang bisa dikoordinasikan antara para pemangku kepentingan.
3	Dalam RPJMD Kabupaten Situbondo, terdapat dukungan visi dan misi Bupati yang meliputi program CSR untuk membina UMKM dan	Pola pikir parsial yang dimiliki masyarakat serta kebiasaan mengelola secara mandiri tanpa adanya struktur kelembagaan formal.

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	membangun daerah, serta gotong royong komunitas media wisata dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata.	
4	Masyarakat merasakan manfaat ekonomi berupa peluang usaha yang terbuka meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan wisata.	perbedaan pendapat dalam hal akses dan penataan kawasan wisata, khususnya terkait jalur masuk yang mengarah ke lokasi objek wisata.
5	Terdapat visi bersama untuk melestarikan lingkungan sekaligus mengembangkan usaha kerajinan lokal yang terbuat dari kerang dan kayu di kawasan Wisata Kampung Blekok.	Belum adanya kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara BUMDes dan POKDARWIS, serta koordinasi yang baru terbentuk secara situasional.
6		Minimnya kegiatan pertemuan yang terstruktur antara <i>stakeholder</i> , menyebabkan koordinasi dan persamaan persepsi dalam menentukan prioritas pengelolaan wisata belum optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok melibatkan lintas sektor melalui model *pentahelix* yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media. Hal ini direalisasikan dalam beberapa kegiatan konservasi lingkungan, promosi destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, program CSR dari sektor swasta, serta forum diskusi antar *stakeholder* untuk membangun pengembangan wisata. Namun terdapat kendala seperti belum berjalan secara optimal dengan terhambatnya ketiadaan lembaga pengelola yang tetap dan terstruktur, koordinasi serta komunikasi antar *stakeholder* yang masih lemah, dan pembagian peran yang belum jelas. Faktor pendukung yang menjadi kekuatan adalah dukungan masyarakat lokal, keterlibatan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pengembangan, serta rutinnya pelaksanaan forum diskusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, proses kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok saat ini berada di tahap berkembang, dimana kerjasama antar *stakeholder* telah terbentuk namun belum terintegrasi secara menyeluruh dan maksimal. Merujuk dari hal tersebut disarankan untuk: (1)pemerintah dan seluruh *stakeholder* memperkuat kelembagaan pengelola wisata, (2)meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui forum kolaborasi yang berkelanjutan, (3) memaksimalkan pengembangan potensi wisata melalui peningkatan infrastruktur, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta berkelanjutan.

REFERENSI

- Word Tourism Organization. (2019). International tourism highlights. Madrid: UNWTO.
- Schubert, S. F., Brida, J. G., & Risso, W. A. (2011). *The impacts of tourism*. *Tourism Economics*, 17(5), 971-998.
- Dodds, R., & Butler, R. (2019). *Overtourism: Issues, realities and solutions*. Berlin: De Gruyter.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Jakarta: PT Grasindo
- Rahmawati, E., Setyowati, D.I., & Nugraha, S. B. (2021). *Ekowisata dan jasa lingkungan*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Solahuddin. (2021). *Kolaborasi penta helix dalam pengembangan pariwisata*. Jember: Penerbit Buku Ajar (E-Book/ResearchGate).
- Winata, Edi. (2024). *Pengantar pariwisata*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). *Pariwisata berkelanjutan: konsep, penerapan, dan tantangan*. Widina Media Utama.
- Wirawan, P. E., & Semara, I. M. T. (2021). *Pengantar pariwisata*. Denpasar: IPB Internasional Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, C., Subowo, A., & Maesaroh. (2022). Kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata pada Desa Wisata kandri Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Fatin, A. d., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 15(1), Juni. ISSN 2087-8923; e-ISSN 2549-9319.
- Septiani, N. J., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2020). Proses kolaborasi stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70-80.
- Triandru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi stakeholder dalam reforma agrarian dengan pola redistribusi tanah di kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 202-216.
- Dahrilab Ashar. (2024). Pariwisata dan pembangunan wilayah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1), 15-27.

- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 10(1), 55-68.
- Ashar, D. (2024). Kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Karst Rammang-Rammang menuju warisan Geopark UNESCO di Kabupaten Maros. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Nikma, A. A. (2020). Kolaborasi stakeholder pada program Gerakan Tenggok Sawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek. *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Zhafira, W. (2021). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Industri kerajinan manik-manik (Studi di Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang). *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang*.
- Fikri, A. (2019/2020). Kolaborasi pemerintahan daerah kabupaten kombok barat dengan pemerintah kota mataram dalam pengelolaan sumber daya air (Studi kasus di PDAM Giri Menang). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Sari, E. P. (2021). Kolaborasi stakeholder dalam mendorong terwujudnya pengembangan kampung budaya dengan persektif pentahelix (Studi pada Kampung Cempluk di Kabupaten Malang. *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang*.
<https://kolomdesa.com/kampung-blekok-habitat-burung-endemik-langka-9287/>
<https://share.google/8eD7G6IOpcUBNnONo>